



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN SELATAN

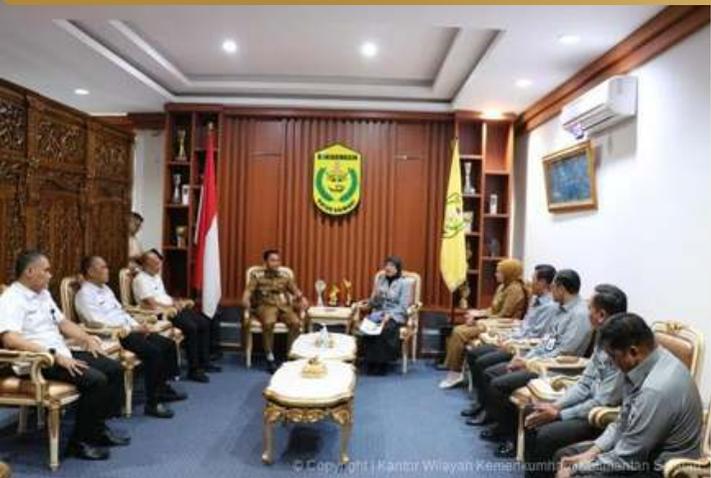
# bangga  
melayani  
bangsa



# KEMENKUM KALSEL NEWS

# BULETIN

MINGGU KE-1 MARET 2025



## KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[kumham\\_kalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](http://kalsel.kemenkum.go.id)

# Simak Arahan Kakanwil, Jajaran Kemenkum Kalsel Perkuat Kinerja Tahun 2025



Banjarmasin, Humas\_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, memberikan arahan kepada seluruh jajaran dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Senin (03/03). Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Pejabat Manajerial, serta Pejabat Non-Manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam arahannya, Nuryanti Widyastuti menekankan pentingnya menjaga kinerja maksimal selama bulan puasa, dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Meskipun menjalankan ibadah puasa, kita tetap harus bekerja maksimal agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT," ujarnya.

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus disikapi dengan strategi yang tepat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. "Kita harus cermat dalam menyusun strategi agar efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas pencapaian target kerja," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil mengingatkan kembali berkaitan dengan tugas fungsi per Divisi dan Bagian Umum, disiplin dan tata naskah dinas Kementerian Hukum. Semangat dalam membangun Zona Integritas menuju WBK juga menjadi fokus utama, dengan mengajak seluruh jajaran untuk berperan aktif dan bertanggung jawab guna meraih predikat WBK pada tahun 2025.

Dengan arahan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel semakin termotivasi untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan berkontribusi dalam pencapaian predikat WBK pada tahun 2025.



# Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Bersama Pemkab Tapin, Optimalkan Pemungutan Pajak Bagi Kesejahteraan Masyarakat



Banjarmasin, Humas\_Info – Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tapin, Senin (03/03) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Rapat harmonisasi merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 100.3.2/045/BAGKUM/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal pengharmonisian Ranperkada tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Memimpin jalannya rapat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana sampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pemungutan pajak daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

“Dengan harmonisasi Raperkada ini, kita berharap regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan wajib pajak,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, Pajar Safari, menjelaskan dasar penyusunan rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Kegiatan harmonisasi Raperkada dilanjutkan dengan penyampaian hasil pembahasan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan sebelum Raperkada ini ditetapkan dan diundangkan sehingga Raperkada ini dapat segera diterapkan guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah demi pembangunan yang berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, Pajar Safari dan jajaran pada bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin.



# Penguatan Peran Pegawai Outsourcing, Kakanwil Kemenkum Kalsel: Keramahan dan Integritas Kunci Pelayanan Publik Prima



Banjarmasin, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, memberikan pengarahan kepada pegawai outsourcing yang terdiri dari Helpdesk, Security, Driver, dan Office Boy di Balai Pertemuan Garuda pada Senin (3/3). Dalam pengarahan tersebut, Kakanwil menekankan pentingnya profesionalisme, integritas dan peran strategis pegawai outsourcing dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, terutama di bulan Ramadhan.

"Kinerja yang baik dari rekan-rekan semua sangat berpengaruh dalam menciptakan pelayanan yang optimal. Saya harap seluruh pegawai outsourcing dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga disiplin kerja," ujar Nuryanti.

Selain itu, Kakanwil juga menegaskan bahwa pegawai outsourcing memiliki kontribusi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menekankan bahwa komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun merupakan bagian dari integritas yang harus dijunjung tinggi.

"Helpdesk, Security, Driver, dan Office Boy memiliki peran penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keramahan dan profesionalitas dalam bekerja adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas," tambahnya.

Di akhir arahnya, Kakanwil juga menyampaikan komitmen efisiensi anggaran tanpa mengurangi hak-hak pegawai, termasuk pegawai outsourcing. "Meskipun kita melakukan efisiensi, kami memastikan bahwa hak-hak pegawai tetap terpenuhi dan kinerja tetap optimal," pungkasnya.



# Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Manajemen Risiko SPBE Kementerian Hukum Tahun 2025

Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum pada Senin (03/03). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola manajemen risiko SPBE di lingkungan Kementerian Hukum secara berkelanjutan.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh unit utama serta kantor wilayah Kementerian Hukum, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek penting dalam penerapan manajemen risiko SPBE, antara lain:

1. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE
2. Konteks Risiko SPBE
3. Penilaian Risiko SPBE
4. Penanganan Risiko SPBE
5. Pemantauan Risiko SPBE

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama terkait proses, keluaran, serta tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko SPBE. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, serta akuntabel.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung penerapan manajemen risiko SPBE guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital di lingkungan Kementerian Hukum. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan risiko, sehingga pelaksanaan SPBE dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.



# Pemkab Hulu Sungai Selatan dan Kemenkum Kalsel Harmonisasikan Raperbup SPBE untuk Pelayanan Digital yang Lebih Optimal



Banjarmasin, Humas\_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, Selasa (04/03). Rapat dipimpin oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardiah membahas Raperbup tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rahmawaty, menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) ini menjadi pedoman dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Melalui rapat harmonisasi Ranperbup, masukan dari perancang perundang-undangan Kalimantan Selatan akan memperkaya sekaligus memperjelas substansi regulasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik,” jelasnya.

Bahjatul Mardiah menjelaskan bahwa masukan dari tim perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) Kalimantan Selatan akan berkontribusi dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

“Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital,” ujar Bahjatul.

Rapat harmonisasi dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan pasal per pasal oleh Tim Perancang Perundang-Undangan Kalimantan Selatan. Hadir dalam kegiatan, Sekretaris Diskominfo Kab. HSS, Tatik Sri Rahayu; Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Diskominfo Kab. HSS, Erfan Ramadhani beserta jajaran terkait.



## Perkuat Sinergi, Kakanwil Kemenkum Kalsel Audiensi dengan Walikota Banjarmasin



Banjarmasin, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti, melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Walikota Banjarmasin, H. M. Yamin, serta Wakil Walikota Banjarmasin, Hj. Ananda, di Kantor Pemko Banjarmasin pada Selasa (4/3). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam berbagai aspek tugas dan fungsi kementerian.

Dalam pertemuan ini, Kakanwil Kemenkum Kalsel turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Selain bersilaturahmi, Kakanwil juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.

"Kami mengucapkan selamat kepada Bapak H. M. Yamin dan Ibu Hj. Ananda atas amanah baru sebagai pemimpin Kota Banjarmasin. Semoga kerja sama antara Kemenkum Kalsel dan Pemko semakin erat demi kepentingan masyarakat," ujar Nuryanti.

Audiensi ini membahas berbagai agenda strategis, seperti layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembentukan produk hukum daerah, serta pembinaan dan penyuluhan hukum. Secara khusus, pertemuan ini juga menyoroti kerja sama dalam bidang kekayaan intelektual serta partisipasi para lurah di Kota Banjarmasin untuk mengikuti Paralegal Justice Award 2025.

"Kami ingin memastikan para lurah di Banjarmasin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang Paralegal Justice Award, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin baik," tambahnya.

Walikota Banjarmasin, H. M. Yamin, menyambut baik audiensi ini dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Kemenkum Kalsel.

"Kami sangat mengapresiasi upaya Kemenkum Kalsel dalam mendukung pembangunan hukum di Banjarmasin. Ke depan, kami akan menindaklanjuti kerja sama ini, termasuk melalui perpanjangan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ungkapnya.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalsel yang melakukan audiensi terpisah terkait tugas dan fungsi Keimigrasian. Dengan pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal semakin erat, sehingga pelayanan hukum dan keimigrasian bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.



# Kolaborasi Kemenkum Kalsel dan Pemkot Banjarmasin, “Baimbai” Dorong Peningkatan Layanan KI



Banjarmasin, Humas\_Info – Optimalkan Pelayanan Kekayaan Intelektual di Banjarmasin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti disela audiensinya dengan Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin, dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda memaparkan berbagai upaya strategis guna mendorong kesadaran serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat umum.

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalsel yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi dan Tim Pokja KI memaparkan data perkembangan permohonan kekayaan intelektual di Kota Banjarmasin. Tercatat pada tahun 2024, terdapat 322 permohonan merek, 112 permohonan paten, 36 permohonan desain industri, serta 2.226 permohonan hak cipta. Angka ini menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam pencatatan KI di daerah, sekaligus menegaskan pentingnya fasilitasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha dan inovator lokal.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengembangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dengan Kampung Sasirangan dan Kampung Ketupat sebagai kandidat potensial. Kampung Sasirangan, yang dikenal sebagai sentra pembuatan kain khas Banjarmasin, saat ini sedang dalam proses pengajuan sebagai Kawasan Karya Cipta yang diharapkan dapat memperoleh pencanangan resmi sebelum Maret 2025. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat.

Selain itu, audiensi juga menyoroti pentingnya pendaftaran merek kolektif bagi komunitas usaha di Banjarmasin. Beberapa merek kolektif yang telah terdaftar meliputi “Sasirangan Sungai Jingah Banjarmasin” dan “Dekranasda Banjarmasin,” sementara untuk tahun 2025, Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mendorong inventarisasi merek kolektif lainnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal dan memperkuat branding Banjarmasin di kancah nasional maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sejak 20 Oktober 2023. MoU ini mencakup aspek pembentukan, pelayanan, dan pengembangan budaya hukum, serta penghormatan dan pemajuan Hak Asasi Manusia, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual. Masa berlaku MoU ini hingga 20 Oktober 2025, dengan rencana pelaksanaan program kerja sama bersama dinas terkait.



## Audiensi Bersama Pemkot Banjarmasin, Kemenkum Kalsel Dorong Partisipasi Lurah Banjarmasin Ikuti Paralegal Justice Award 2025

Banjarmasin, Humas\_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti, mendorong partisipasi lurah di Kota Banjarmasin dalam ajang Paralegal Justice Award Tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam audiensi dengan Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin, serta Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda. Program ini dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan peran lurah dalam penyelesaian sengketa hukum secara non-litigasi di masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin, bersama Wakil Wali Kota Hj. Ananda menyambut baik inisiatif ini. Mereka menilai ajang Paralegal Justice Award merupakan bentuk apresiasi bagi aparat pemerintahan tingkat kelurahan yang memiliki dedikasi dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum secara kekeluargaan. Dengan keterlibatan lebih banyak lurah, diharapkan penyelesaian hukum berbasis musyawarah dan kearifan lokal dapat semakin berkembang di Banjarmasin.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, turut memaparkan manfaat program ini bagi aparat desa dan kelurahan. Ia menegaskan bahwa Paralegal Justice Award tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas hukum para lurah. Dengan bekal pemahaman hukum yang lebih baik, lurah dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik di lingkungan masing-masing sebelum masuk ke jalur hukum formal.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, turut mengapresiasi upaya ini dan mendorong lebih banyak lurah untuk berpartisipasi. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung kesuksesan Paralegal Justice Award Tahun 2025 dengan memberikan fasilitasi serta pendampingan bagi lurah yang berkompetisi dalam ajang tersebut. Diharapkan, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, partisipasi Kota Banjarmasin dalam Paralegal Justice Award 2025 dapat semakin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.



# Kakanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Dukung Visi Gubernur "Kalsel Bekerja"



Banjarmasin, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang beragenda Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Awal Masa Jabatan 2025-2030. Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kalsel pada Selasa (4/3/2025) ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Rapat Paripurna ini diawali dengan penampilan kesenian Madihin dan pemutaran video selang pandang Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode 2025-2030. Dalam pidato sambutannya, Gubernur Kalsel mengapresiasi capaian pembangunan di Kalsel dan mengajak seluruh unsur untuk bekerja bersama dalam mewujudkan visi "Kalsel Bekerja" – Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera.



Menanggapi visi yang disampaikan oleh Gubernur, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyatakan dukungannya terhadap upaya pembangunan yang berbasis kepastian hukum.

"Kami di Kemenkum Kalsel siap berkontribusi dalam mewujudkan visi Kalsel Bekerja dengan memastikan regulasi yang mendukung investasi dan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan baik. Sinergi antar-lembaga menjadi kunci untuk menciptakan Banua yang lebih maju," ujarnya.

Acara ditutup dengan penyampaian ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel yang baru. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, mencerminkan komitmen bersama untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju dan sejahtera dalam lima tahun ke depan.



# Pelantikan PPNS dan Notaris Pengganti, Kakanwil Kemenkum Kalsel: Tanggung Jawab Harus Diemban dengan Profesionalisme



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Wilayah Kalimantan Selatan dan Notaris Pengganti Kota Banjarmasin, Rabu (5/3/25). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, di hadapan para saksi, rohaniwan, jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel, serta para tamu undangan.

Momentum pelantikan ini bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dalam kesempatan ini, Nuryanti mengingatkan bahwa Ramadhan mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab yang harus dipegang teguh dalam menjalankan amanah jabatan. Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya antara lain:

1. PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Trisetya Hadi Saputra;
2. PPNS Loka POM di Kabupaten Tabalong, Taufiqurrohman;
3. PPNS Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu, Syaikul Ansari;
4. PPNS Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tapin, Muhammad Lathief;
5. PPNS Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tapin, Siti Samiah;
6. Notaris Pengganti Kerina Maulidya Putri, yang menggantikan sementara Notaris Kota Banjarmasin Nur Alia yang menjalani cuti mulai 5 Maret 2025 hingga 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Nuryanti menjelaskan bahwa PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

"PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang atau peraturan daerah yang dikawal dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian. Kendali atas proses penyidikan tetap berada dalam kapasitas membantu tugas Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum (APH)," ujar Nuryanti.

Selain pelantikan PPNS, juga dilaksanakan pelantikan Notaris Pengganti. Dalam kesempatan tersebut, Nuryanti kembali mengingatkan bahwa tugas seorang Notaris Pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Nuryanti juga berpesan kepada Notaris Pengganti agar selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan dalam menjalankan tugasnya.

"Jangan ragu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan jika menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan kenotariatan kepada masyarakat. Semoga amanah yang diemban hari ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi teladan dalam penegakan hukum yang berkeadilan," pungkaskan Nuryanti.

## Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Siap Sumpah Tiga Pemain Naturalisasi di Roma



JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengutus tim Sekjen dan Dirjen AHU untuk proses pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi yang rencana hari ini, Kamis 6 Maret 2025, bertolak ke Italia.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara tersebut adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR serta Presiden Republik Indonesia.

"Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia," kata Menteri Hukum yang juga penggemar bola itu.

Semua dokumen kewarganegaraan telah diteliti dengan benar, dan proses pewarganegaraan juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia ini bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," tegas Supratman.

Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Dean, Emil, dan Joey akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

"Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA," ujar Menteri Hukum.

Menteri juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan jajaran pemerintah lainnya seperti Kemenpora dan khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden Prabowo agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026. Pada bulan Maret ini, Timnas sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana akan melawan tuan rumah Australia dan menjamu Bahrain di StadionGBK. Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kementerian Hukum, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma pada tanggal 10 Maret 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut menyampaikan dukungan terhadap langkah ini.

"Kami menyambut baik percepatan proses naturalisasi ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Semoga dengan kehadiran mereka, Timnas Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di level dunia," ungkap Nuryanti Widyastuti.

# Rapat Koordinasi Pembentukan Posbankum, Kemenkum Kalsel Siapkan Langkah Strategis



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) mengambil langkah strategis dalam persiapan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa/kelurahan di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan akses layanan informasi hukum, konsultasi hukum, penyelesaian konflik melalui mediasi, dan rujukan advokat bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti beserta jajaran perwakilan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kamis, (06/03/2025). Rapat ini membahas secara rinci persiapan pembentukan Posbankum di seluruh Indonesia, termasuk di Kalsel.

"Pembentukan Posbankum ini sangat penting untuk mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat, terutama di desa-desa," ujar Koordinator Penyuluh Hukum Kemenkumham Kalsel, Dianor, S.H., M.H.



Dalam rangka mewujudkan pembentukan Posbankum, Kemenkum Kalsel telah melakukan koordinasi dengan bagian hukum pemerintah kabupaten/kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah memiliki rumah mediasi atau rumah restorative justice (RJ) yang dapat dimanfaatkan sebagai Posbankum.

Selain pembentukan Posbankum, rapat koordinasi juga membahas pembinaan pelaksanaan aktualisasi peserta pelatihan paralegal serentak khusus anggota Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Kemenkum Kalsel memberikan fasilitas dan pendampingan dalam proses aktualisasi dan pemenuhan administrasi kelengkapan berkas.

"Dari 46 peserta pelatihan paralegal di Kalsel, 35 peserta telah memenuhi data dukung. Selain itu, 5 Posbankum telah terdeteksi di Google Maps," ungkap Dianor.

Nuryanti Widyastuti menanggapi bahwa Kantor Wilayah siap menyukseskan pembentukan Posbankum di wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan petunjuk dan arahan dari BPHN.

# Standar Layanan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Banjarmasin, Humas\_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Standar Layanan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan diikuti secara virtual bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Kamis (06/03).

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menyampaikan sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

“Kemenkum berkomitmen meningkatkan kualitas perancangan peraturan daerah dan kepala daerah melalui inovasi digital E-Harmonisasi. Aplikasi ini memungkinkan pengharmonisasian Raperda dan Raperkada secara elektronik, menjadikannya lebih efektif dan efisien. Selain itu, layanan publik harus transparan, aksesibel, dan berkualitas. Dengan E-Harmonisasi, proses pengajuan, pemantauan jadwal, hingga penyelesaian rancangan peraturan dapat dilakukan digital, memudahkan pemerintah daerah menyusun regulasi,” jelas Dhahana.

“Selain itu, Kanwil Kemenkum untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Diklat Perancang PUU, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi perancang dalam menyusun regulasi yang berkualitas,” pungkasnya.



# DPRD Tabalong Gandeng Kemenkum Kalsel Harmonisasi Ranperda Pondok Pesantren



Banjarmasin, Humas\_Info - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tabalong tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren, yang mana dalam penyusunannya telah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 58 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ranperda Kabupaten Tabalong tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren wajib dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah.



Dalam permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Ranperda dimaksud, delegasi dari DPRD Kabupaten Tabalong, Alfi Rosydati, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong, mengajukan secara langsung sekaligus berkoordinasi dan berkonsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diterima oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kamis, (06/03/2025).

Jalinan kerja sama yang baik dalam pengejawantahan tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten Tabalong tidak hanya melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah saja. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kerja sama telah diaplikasikan melalui penyusunan naskah akademik dan Ranperda.



# FGD WBK/WBBM: Kakanwil Kemenkum Kalsel Tegaskan Pentingnya Evaluasi Berkelanjutan



Banjarmasin, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, bersama Tim Pokja WBK Kanwil Kemenkum Kalsel turut serta dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait persiapan evaluasi dan penyampaian petunjuk teknis pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui teleconference dan diikuti oleh Unit Eselon I, Kantor Wilayah, serta satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (6/3/25).

Dalam sambutannya, Inspektur Wilayah V menegaskan pentingnya evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Acara ini juga diisi dengan paparan dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, yang menjelaskan mekanisme evaluasi WBK/WBBM. Para peserta yang terdiri dari perwakilan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, satuan kerja, dan auditor aktif berdiskusi dalam sesi tanya jawab.

Salah satu poin utama dalam kegiatan ini adalah penyampaian draft petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi Zona Integritas oleh Auditor Madya, Titut Sulistyansih. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan agar pelaksanaan WBK/WBBM semakin optimal.

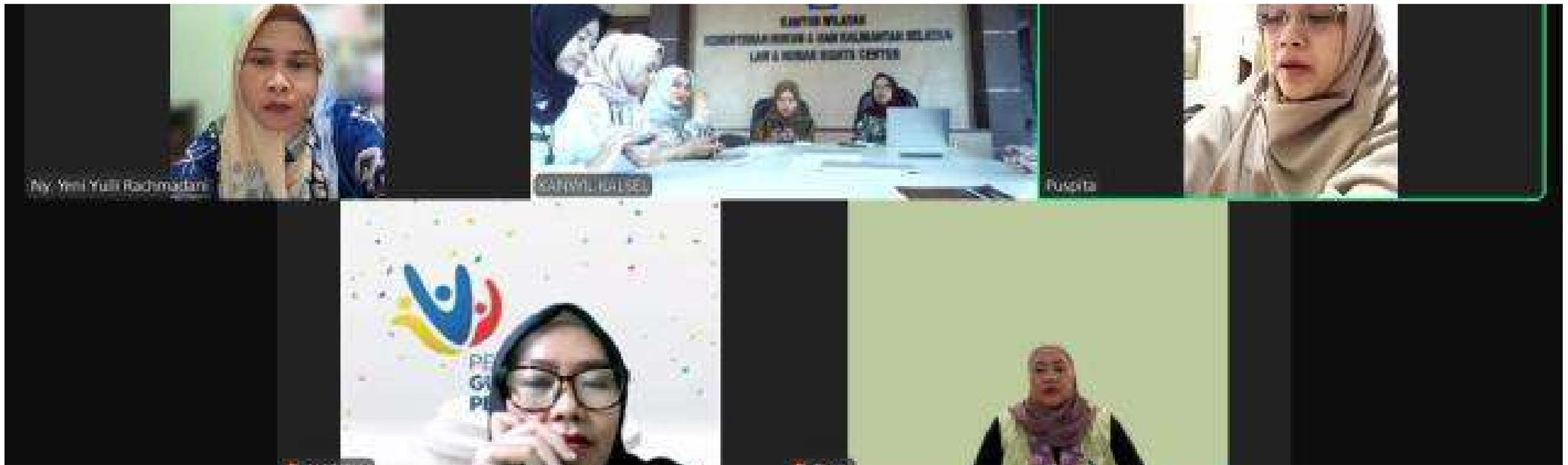
Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya penerapan evaluasi yang ketat dan akuntabel dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Evaluasi WBK/WBBM harus dilakukan dengan standar yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara tim Pokja, auditor, serta seluruh satuan kerja menjadi kunci keberhasilan dalam membangun Zona Integritas,” ujar Nuryanti Widyastuti.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan agar setiap unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen penuh dalam melaksanakan setiap tahapan evaluasi dan pemantauan WBK/WBBM sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Dengan adanya FGD ini, diharapkan upaya peningkatan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terus ditingkatkan.



## Secara Virtual, DWP Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Program Kerja dan Pertemuan Rutin DWP



Banjarmasin, Humas\_Info - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat persiapan guna membahas program kerja serta pertemuan rutin DWP. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (06/03) ini dihadiri oleh anggota DWP secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Pertemuan dibuka oleh Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kalsel, Ny. Desty Anton Edward Wardhana yang dalam menekankan pentingnya perencanaan program kerja yang efektif guna mendukung berbagai kegiatan DWP ke depan. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk berpartisipasi aktif dalam program yang telah disusun demi memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DWP, Ny. Puspita Meidy Firmansyah ini, selain membahas program kerja, dalam pertemuan ini juga dilaksanakannya serah terima jabatan Bendahara II DWP Kanwil Kemenkum Kalsel karena bendahara sebelumnya berpindah tugas ke Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan DWP Kanwil Kemenkum Kalsel dapat semakin solid dalam menjalankan program-program yang telah dirancang serta terus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Sertijab Kepala BPK: Wujud Sinergi untuk Akuntabilitas Keuangan Daerah

Banjarbaru, Humas\_Info – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel), Anton Edward Wardhana, menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Selatan. Acara yang berlangsung pada Kamis, 6 Maret 2025, di Auditorium Kantor BPK Kalsel, Banjarbaru, ini menandai pergantian kepemimpinan dari Ruben Artia Lumbantoruan kepada Andriyanto.

Anton Edward Wardhana hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi antarinstansi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Anton menegaskan pentingnya kerja sama antara BPK dan instansi pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas.

"Kemenkum Kalsel selalu mendukung upaya BPK dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kami berharap sinergi yang telah terjalin selama ini dapat semakin erat, terutama dalam aspek hukum terkait pengelolaan keuangan daerah," ujar Anton Edward Wardhana.

Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, yang turut hadir dalam acara tersebut, juga menekankan pentingnya peran BPK dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

"Sinergi antara BPK dan berbagai instansi, termasuk Kemenkumham, sangat diperlukan untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik," katanya.

Andriyanto, selaku Kepala BPK Kalsel yang baru, berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan di Kalimantan Selatan. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Acara sertijab ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara BPK, Kemenkumham, dan instansi lainnya dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kalimantan Selatan.



## Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Serah Terima Jabatan Danlanal Banjarmasin, Dukung Sinergi dan Kolaborasi Antar Instansi



Banjarmasin, Humas\_Info – Suasana penuh khidmat dan kebersamaan menyelimuti Gedung Mustafa Ideham saat berlangsungnya acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Banjarmasin, Sabtu (08/03). Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi daerah, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, yang hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Laut Didik Kusyanto, M.Tr. Hanla., secara resmi menyerahkan tongkat komando kepada penggantinya, Kolonel Laut Ahmad Ahsan, S.E., M.Tr. Hanla., M.M. Prosesi serah terima ini diawali dengan pemutaran video refleksi perjalanan kepemimpinan Kolonel Didik selama bertugas di Lanal Banjarmasin. Dalam sambutannya, Kolonel Didik mengungkapkan rasa terima kasih dan harapan agar kepemimpinan yang baru dapat semakin memperkuat peran strategis Lanal Banjarmasin dalam menjaga keamanan maritim di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kolonel Laut Ahmad Ahsan menyampaikan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh dedikasi.

"Saya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran, demi menjaga keamanan laut di wilayah ini. Sinergi dengan semua pihak, termasuk Kemenkum Kalsel, akan menjadi kunci keberhasilan kami," ungkapnya.

Sebagai perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru, serta menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum dan militer.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama erat yang telah terjalin selama ini. Dengan kepemimpinan yang baru, kami yakin kolaborasi ini akan semakin kuat dalam mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Selatan," katanya saat di wawancara.





**KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

